

Dilantik Jadi Hakim MK, Arsul Sani Sudah Mundur dari DPR dan PPP

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Arsul Sani sebagai Hakim Konstitusi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1).

Arsul mengaku telah mengundurkan diri dari jabatan anggota DPR RI dan juga MPR RI. Arsul juga sudah mundur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Sesuai Undang-Undang MK dan Undang-Undang MD3, pertama kalau menurut Undang-Undang MK seorang hakim MK tidak boleh merangkap jadi pejabat negara. Maka saya telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota MPR dan DPR RI itu pada minggu pertama bulan Desember," kata Arsul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1).

Arsul juga menegaskan bahwa dirinya telah men-

gundurkan diri dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan.

"Seorang hakim MK tidak boleh menjadi anggota partai politik apalagi pengurus, maka saya juga telah mengajukan pada bulan Desember itu pengunduran diri dari jabatan dan keanggotaan di PPP," kata Arsul.

Arsul juga mengaku menanggalkan profesinya sebagai advokat dan juga mengundurkan diri sebagai wakil ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi.

"Dan terakhir karena saya pernah ada di sebuah partnership kantor hukum, meskipun sudah nonaktif sejak dilantik sebagai anggota DPR, maka untuk menegaskan saya juga sudah mengundurkan diri, jadi hari semuanya clear lah," katanya. ● han

Problem Netralitas ASN Kala Pemilu Dinilai Terkait Erat Budaya Feodalistik

JAKARTA (IM) - Problem pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam proses pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, dinilai terkait erat dengan budaya feodalistik yang masih lekat di tengah masyarakat.

Pakar hukum tata negara Bivritri Susanti menilai salah satu faktor maraknya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilpres adalah sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kurang tegas mempraktikkan komitmen itu. Selain itu, karena hukumannya yang relatif kurang tegas juga membuat pelanggaran berulang meski dilakukan oleh ASN yang merupakan pejabat.

"Jangan lupa, kultur di kita yang sangat feodalistik, sangat melayani atasan," katanya, dikutip dari Kompas TV, Rabu (17/1).

Di sisi lain, Bivritri menilai kurangnya kemauan buat

menegakkan aturan terkait netralitas juga terlihat dari minimnya aksi pemerintah yang dilakukan buat memastikan hal itu berjalan.

"Saya tidak melihat komitmen itu dan juga tidak ada aksi langsung seperti membuat saluran-saluran pengaduan," ucap Bivritri.

Salah satu contoh kasus pelanggaran netralitas ASN adalah sikap Kepala Bidang Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Novie Riyanto sebagai saksi untuk dua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, mengatakan, Novie di-

periksa pada Kamis (18/1), di gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, pada 27 Juli 2023 dan 1 Desember 2024, Novie dipanggil menghadap penyidik KPK.

Ali menjelaskan bahwa kedua tersangka baru itu merupakan aparat sipil negara (ASN). Keduanya ditetapkan tersangka setelah KPK melakukan pengembangan kasus suap yang menjerat terpidana Dion Renato

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KPK Panggil Lagi Sekjen Kemenhub, Jadi Saksi untuk Dua Orang Tersangka Baru Suap di DJKA

KPK tetapkan 14 orang tersangka kasus suap proyek jalur kereta di DJKA, Kemenhub. Namun baru 12 pelaku yang dijabarkan ke penjara.

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Novie Riyanto sebagai saksi untuk dua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, mengatakan, Novie di-

periksa pada Kamis (18/1), di gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, pada 27 Juli 2023 dan 1 Desember 2024, Novie dipanggil menghadap penyidik KPK.

Ali menjelaskan bahwa kedua tersangka baru itu merupakan aparat sipil negara (ASN). Keduanya ditetapkan tersangka setelah KPK melakukan pengembangan kasus suap yang menjerat terpidana Dion Renato

Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung.

Dion merupakan satu dari 10 orang tersangka yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 lalu. Bertolak pada fakta hukum persidangan Dion, KPK kemudian mengembangkan perkara ini dan menetapkan tersangka baru.

"Benar KPK saat ini kembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu 2 orang ASN," ujar Ali.

KPK telah menetapkan 14 orang tersangka dalam perkara suap proyek jalur kereta di DJKA, Kemenhub.

Namun sejauh ini, baru 12 pelaku yang telah diseret masuk ke bui.

Selain Dion, mereka adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadhi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan. Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Afandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima

PELUNCURAN BUKU HAKIM KONSTITUSI

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kedua kiri) bersama mantan hakim MK Manahan Sitompul (kiri) memberikan buku kepada mantan Ketua MK Jimmy Asshiddiqie (kanan) saat peluncuran buku Hakim Konstitusi tahun 2024 di MK, Jakarta, Kamis (18/1). MK meluncurkan empat buku Hakim Konstitusi tahun 2024 yang ditulis oleh Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, dan Arsul Sani.

Langkah Ganjar Beri Efek Jera Koruptor, Miskinkan dan Kurung di Nusakambangan

JAKARTA (IM) - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, menghadiri acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas), di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/1).

Dalam kesempatan itu, Ganjar-Mahfud menyampaikan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang antikorupsi sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan kelak. Melalui teladan dari pimpinan tertinggi yakni Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar-Mahfud akan menonjolkan kepemimpinan yang bersih dengan segudang

pengalaman di pemerintahan.

"Pemberantasan korupsi ternyata paling gampang adalah teladan dari pemimpin tertinggi. Praktek itu kami berdua pernah punya pengalaman," ujar Ganjar didampingi Mahfud, Rabu (17/1) malam.

Gajar menyebut menyebut koruptor perlu diberikan hukuman efek jera. Salah satu caranya dengan memiskinkannya, atau menjebloskannya ke Lapas Nusakambangan.

"Dan lalu kalau itu tidak jera, efeknya memiskinkan koruptor. Kami kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," terang Ganjar dalam pidatonya.

Menurut Ganjar, menjadi kewajiban penuntut untuk menerapkan pasal tambahan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga perlu untuk memberikan efek jera. Untuk mewujudkan itu, ia merasa, perlu memberlakukan RUU Perampasan Aset.

"Wajib penguatan penabahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU perampasan aset inilah respon yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang," terang Ganjar.

Menurutnya, komitmen pemberian efek jera kepada koruptor bisa berjalan bila ada sinergi antar-lembaga. Bahkan, ia menilai untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. "Sekali lagi komitmen ini bisa berjalan kalau ada contoh maka sinergi antar lembaga menjadi penting," kata mantan Gubernur Jawa Tengah (Jatng) itu. ● meci

Berantas Korupsi Ala Prabowo: Naikkan Gaji Pejabat, Sanksi yang Tak Patuh LHKPN

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah gagasan terkait pemberantasan korupsi. Ia menyebut soal perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara, pemberian sanksi terhadap pejabat yang tak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga komitmen para pemimpin.

Gagasan ini disampaikan pada acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1).

Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan realistis. Pendekatan sistemik dan realistis itu, menurut Prabowo, bisa diwujudkan dengan perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar.

"Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo di Gedung KPK, Jakarta.

Prabowo mencontohkan hakim di sejumlah negara maju seperti Amerika dan Inggris. Di negara-negara tersebut, hakim dijamin kesejahteraan selama hidup, bahkan hingga meninggal dunia. Ketua Mahkamah Agung menjadi pejabat negara yang gajinya paling tinggi dan rumah dinas yang lebih besar dari menteri.

"Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar

sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku heran, di Indonesia, gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN jauh lebih besar ketimbang Panglima TNI, menteri, dan direktur jenderal (dirjen) pemerintahan yang memegang anggaran negara triliunan rupiah.

Padahal, jika gaji penyelenggara negara ditingkatkan dan kualitas hidupnya diperbaiki, Prabowo yakin angka korupsi dapat ditekan.

"Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga. Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus," kata Prabowo.

Tertib LHKPN

Prabowo juga mengaku setuju dengan pimpinan KPK, bahwa para pejabat harus patuh menyampaikan LHKPN. Jika ada yang tak jujur melaporkan LHKPN, Prabowo janji bakal menjatuhkan sanksi.

"Semua kekayaan harus dilaporkan," katanya.

Prabowo menyebut, korupsi merupakan tindakan yang merusak bangsa dan bisa menggagalkan upaya Indonesia menjadi negara maju. Oleh karenanya, ia mengaku berkomitmen untuk memberantas korupsi jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya. ● han

Cegah Penyebaran Hoaks, AMSI dan KPU Teken MoU

JAKARTA (IM) - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman atau MoU Cek Fakta dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, untuk menekan penyebaran hoaks atau berita bohong.

Pemilu 2024 mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

Nota kesepahaman (MoU) nomor: 03/MoU/AMSI/1/2024 dan nomor 2/PR.07-NK/01/2024, ditandatangani oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dhyatmika dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy'ari.

"Kerja sama ini untuk memberikan informasi yang benar agar masyarakat terhindar dari berita bohong (hoaks) dalam pemilu," demikian rilis yang diterima MPI, Kamis (18/1).

Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait tahapan, program, dan jadwal pemilu yang terpercaya yang akan tersedia di masing-masing etalase informasi kedua lembaga.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan cek fakta, kedua belah pihak juga sepakat dalam penyediaan dokumen penunjang yang diperlukan dan melakukan peningkatan kapasitas masing-masing pihak serta tersedianya dokumentasi, pendataan, dan penyusunan bahan rujukan cek fakta juga sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

AMSI dan KPU RI juga telah menunjuk perwakilan dari masing-masing lembaga yang akan menjadi penghubung untuk kelancaran kerja sama yakni, Felix Lamuri yang sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif AMSI dan dari KPU diwakili oleh Bernad Dermawan Sutrisno, Sekjen KPU RI.

Nota kesepahaman antara AMSI dan KPU RI berlaku selama 3 tahun terhitung sejak nota kesepahaman ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan bersama. ● meci



KUNJUNGAN MENKOMINFO DI BANDUNG

Menkominfo Budi Arie Setiadi memberikan pemaparan saat kunjungan kerja di Bandung, Jabar, Kamis (18/1). Dalam kunjungannya itu, Menkominfo memberikan pemaparan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait Pemilu 2024.

Berantas Korupsi, Anies Janji Beri Hadiah bagi Para Pemburu Koruptor

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, pada acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1), berjanji jika menang di Pilpres 2024 akan memberi hadiah bagi para pemburu koruptor.

Ia yakin, angka korupsi bisa ditekan jika yang memburu koruptor bukan hanya aparat dari KPK, kepoli-

sian, dan kejaksaan saja, tapi melibatkan semua kalangan.

"Semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi," tutur Anies, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (17/1).

Anies juga ingin mengoptimalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat ke KPK. Ia sepakat

dengan pimpinan KPK bahwa pejabat yang tak patuh melaporkan LHKPN harus dijatuhi sanksi berupa demosi, reposisi, atau hukuman lainnya.

Gagasan lainnya, Anies berjanji mengupayakan pemberantasan korupsi terkait peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) dan perdagangan pengaruh (trading in influence).

Revisi UU KPK Selain itu, Anies berjan-

ji akan merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Hal ini mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

"Kita ingin mengembalikan agar KPK beribawa lagi secara legal seperti dulu dan ini artinya merevisi Undang-undang KPK, kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat," kata Anies.

Anies juga berjanji menuntaskan RUU Peram-

pasan Aset untuk memiskinkan para koruptor.

"Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain, ini adalah hukuman yang harus diberikan," ujarnya.

Selain itu, Anies-Muhaimin juga berjanji mengesahkan RUU Pendanaan Politik. Anies bilang, salah satu problem utama sektor politik ialah tidak adanya pendanaan yang cukup dari negara terhadap kegiatan kampanye dan kegiatan partai politik lainnya. ● meci

PENGUMUMAN

PT MITRA BAHANA PASIFIK INDONESIA, berkedudukan di Menara Palma, Lantai 22, Suite 22-02A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham mayoritas saat ini akan mengalihkan seluruh sahamnya kepada anak perusahaannya. Sehingga setelah pengalihan tersebut selesai, anak perusahaan tersebut menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 125 dan 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 19 Januari 2024
Perseroan Direksi

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

Dengan ini dimumkan bahwa PT OUS NUSANTARA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), beralamat kantor di: Soho Capital Podomoro City Lt.25 Unit 2508, Jalan Letjen S. Parman Kav.28, Jakarta Barat, seluruh sahamnya akan diambilalih oleh investor asing yang diumumkan pada alamat tersebut diatas, disertai bukti-bukti yang mendukung untuk diadakan penyelesaian, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Keberatan-keberatan/sanggahan atau konfirmasi terkait hal tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Perseroan pada alamat tersebut diatas, disertai bukti-bukti yang mendukung untuk diadakan penyelesaian, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dimumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DIREKSI PT OUS NUSANTARA INDONESIA